



**TINJAUAN ATAS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN TAHUN 2008 PADA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
MENURUT PSAK NO. 45**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Enny Rohainy
NPM : 022104703

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

Januari 2012

**TINJAUAN ATAS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN TAHUN 2008 PADA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
MENURUT PSAK NO. 45**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan

(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM.,SE.,Ak)

(Dr. Yohanes Indrayono, MM., Drs., Ak.)

**TINJAUAN ATAS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN TAHUN 2008 PADA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
MENURUT PSAK NO. 45**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Sabtu Tanggal 9 Oktober 2010

Eddy Rohainy

NPM : 022104703

Menyetujui

Dosen Penilai,

(Hendro Sasongko, MM., SE., Ak.)

Pembimbing,



(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM.,SE.,Ak)

Co Pembimbing,

(H. Akhsanul Haq, MBA., CMA., CFE)

ABSTRAK

ENNY ROHAINY. 022104703. Tinjauan Atas Metode Pengakuan Pendapatan Dan Pengaruhnya Terhadap Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2008 Pada Institut Pertanian Bogor Menurut PSAK No. 45. Dibawah Bimbingan: Eddy Mulyadi Soepardi dan Akhsanul Haq.

IPB adalah salah satu PTN diantara empat PTN lainnya yang telah mendapatkan status sebagai PT. BHMN sesuai dengan PP Nomor 154 Tahun 2000. Sebagai PT. BHMN, IPB pengakuan pendapatan yang ada di IPB harus sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku umum atau merujuk kepada PSAK No. 45. Permasalahan yang terjadi di IPB, yaitu institut masih mengakui pendapatan dari kegiatan komersi, sementara didalam PSAK No. 45 tidak mengakui adanya pendapatan komersil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Atas Metode Pengakuan Pendapatan Dan Pengaruhnya Terhadap Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2008 Pada Institut Pertanian Bogor Menurut PSAK No. 45.". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan pada Institut Pertanian Bogor. 2). Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan menurut PSAK No.45. 3). Untuk mengetahui sejauh mana metode pengakuan pendapatan yang diterapkan mempengaruhi akurasi penyajian laporan keuangan pada Institut Pertanian Bogor menurut PSAK No. 45.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitiannya adalah analisis kuantitatif (non statistik).

Berdasarkan hasil analisis, terdapat perbedaan antara pengakuan pendapatan yang masuk kedalam aktiva bersih. Perbedaan yang mencolok terdapat dari penerimaan dari KSO (Kerjasama Operasi) dan pendapatan komersil sebesar Rp. 6.062.082.343,-. Hal ini terjadi karena status IPB sebagai PT. BHMN Sehingga IPB diperbolehkan untuk melakukan kegiatan komersil. Seperti KSO dengan PT. Indah Pesona Bogor (Ekalokasari Plaza) dan dengan PT. Bogor Life Science and Technology (PT. BLST).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat hipotesis sementara yaitu Penerapan metode pengakuan pendapatan yang tepat, dapat meningkatkan kesesuaian laporan keuangan IPB dengan PSAK No.45.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaannirrahiim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, hanya atas rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tinjauan Atas Metode Pengakuan Pendapatan Dan Pengaruhnya Terhadap Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2008 Pada Institut Pertanian Bogor Menurut Psak No. 45”**, yang merupakan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan, Bogor.

Penulis menyelesaikan skripsi ini dengan melalui banyak hambatan dan rintangan, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun penulisan hasil. Namun akhirnya, penulis berhasil melalui segala hambatan, yang tentu saja tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orangtua tercinta atas segala dukungan dan dorongan baik moral maupun materiil serta doa yang tak henti-hentinya yang tak mungkin terbalas sampai kapanpun.
2. Bapak Dr. Bibin Rubini, MPd, selaku Rektor Universitas Pakuan
3. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., Drs., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang amat berguna bagi penulisan skripsi ini.
6. Bapak H. Akhsanul Haq, MBA., CMA., CFE. selaku Dosen Co. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada suami tercinta. Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto M.Sc atas segala perhatian dan kasih sayangnya yang tidak pernah putus.
8. Kepada anak-anak saya, dr Radhiyatam Mardhiyah, Asaduddin Abdullah Bsc, Imaduddin Abdullah S.Sos, dan Thaataam Mardliyah atas segala dukungannya kepada mamah.
9. Bapak Wonny dari Kantor Audit Internal Institut Pertanian Bogor yang telah banyak membantu penulis ketika melaksanakan riset.
10. Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Satu bagian perjalanan telah terselesaikan, bagian lain yang lebih besar masih menanti. Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca, demi penyempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amien.

Bogor, Oktober 2010

Enny Rohainy

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	5
1.5.1. Kerangka pemikiran	5
1.5.2. Paradigma Penelitian	8
1.6. Hipotesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pemahaman Tentang Metode Pengakuan pendapatan....	10
2.1.1 Pengertian Metode Pengakuan Pendapatan	10
2.1.2 Fungsi Metoda Pengakuan Pendapatan	12
2.1.3 Jenis-jenis Metode Pengakuan Pendapatan	16
2.2. Pemahaman tentang Penyajian Laporan Keuangan	
Organisasi Nirlaba	17
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba	17
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba	19
2.2.3 Keuntungan dan Keterbatasan Penyajian Laporan	
Keuangan Organisasi Nirlaba.....	20
2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyajian	
Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.....	21
2.2.4.1. Penyajian Laporan Posisi Keuangan	23
2.2.4.2. Penyajian Laporan Aktivitas	25
2.2.4.3. Penyajian Laporan Arus Kas	26
2.3. Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya terhadap	
Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Organisasi	
Nirlaba terhadap PSAK No.45	28
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian	31
3.2. Metode Penelitian	31
3.2.1 Desain Penelitian	31
3.2.2 Operasionalisasi Variabel	34
3.2.3 Metode Penarikan Sampel	35
3.2.4 Prosedur Pengumpulan Data	35
3.2.5 Metode Analisis.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Institut.....	38
4.1.1 Sejarah Singkat Institut.....	38
4.1.2 Struktur Organisasi Institut.....	40
4.1.3 Bidang Usaha dan Kegiatan Institut	41
4.2. Kebijakan Akuntansi IPB	42
4.2.1 Pengakuan Pendapatan yang Berasal Dari Pemerintah.....	43
4.2.2 Pengakuan Pendapatan yang Berasal Dari Dana Masyarakat.....	43
4.2.2.1 Pencatatan Pengakuan Pendapatan dari DM.....	46
4.3. Kebijakan Akuntansi Menurut PSAK	51
4.3.1 Metode Pendapatan Menurut PSAK No. 23.....	51
4.3.2 Pelaporan Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 45	54
4.4. Tinjauan Atas Metoda Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya Terhadap Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2008 Menurut PSAK No.45	58
4.4.1 Tinjauan Metode Pengakuan Pendapatan Institut Pertanian Bogor.....	58
4.4.2 Kesesuaian Laporan Kuangan IPB dengan PSAK No. 45	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran	63

JADWAL PENELITIAN DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Operasionalisasi Variabel	34
Tabel 2 : Laporan posisi keuangan IPB tahun 2008.....	50
Tabel 3 : Tabel persentase dengan menggunakan metode persentase penyelesaian	52

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Struktur Organisasi IPB.....	41
Gambar 2 : Garis Besar Kegiatan IPB Yang Berasal Dari DM.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penyajian Laporan Keuangan sangat penting tidak saja pada perusahaan atau organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi nirlaba. Hal ini merupakan bagian dari akuntabilitas organisasi yang makin dituntut oleh *stakeholders* (para pemangku kepentingan). Pimpinan dan segenap anggota organisasi nirlaba perlu memperhatikan akuntabilitas organisasinya agar peran dan keberadaannya diakui serta kinerja organisasinya terus meningkat. Untuk itu, organisasi nirlaba perlu menyajikan laporan keuangan secara baik sesuai dengan PSAK no. 45. Dengan demikian, organisasi nirlaba dapat membangun kepercayaan publik dan memperkuat dukungan dari para pemangku kepentingan.

Dalam perkembangannya sejak dekade terakhir, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia telah mengalami proses transformasi dari satuan kerja di bawah Departemen Pendidikan Nasional menjadi badan hukum yang independen. Kepemilikan badan hukum perguruan tinggi tersebut masih berada di tangan negara namun badan hukum tersebut mempunyai derajat kemandirian yang besar. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang memberikan otonomi atau kewenangan yang lebih luas kepada beberapa PTN dalam pengelolaan program dan sumberdayanya. Pada tahun 2000, empat PTN di Indonesia memperoleh status sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yaitu Universitas Indonesia, Universitas

Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung, masing-masing sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 152, 153, 154, dan 155 tahun 2000. Setelah mendapat status sebagai BHMN, keempat PTN tersebut memulai proses transformasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas.

Pada tahun anggaran 2007 pendapatan Institut Pertanian Bogor terdiri dari dua golongan yaitu DIPA/APBN sebesar Rp. 142.549.809.302,- dan DM (Dana Masyarakat) yang berasal dari SPP, kerjasama penelitian, usaha komersil, dan lain-lain sebesar Rp. 226.295.786.512,- . Namun pencatatan pendapatan pada Institut Pertanian Bogor harus perlu ditinjau lagi apakah pengakuan pendapatan tersebut telah sesuai dengan PSAK no. 45 atau tidak. Karena status IPB yang saat ini sebagai BHMN mengakibatkan IPB mempunyai kekhasan yang tidak dijumpai pada organisasi bisnis maupun organisasi sosial lainnya. Diperkirakan bahwa pengakuan pendapatan serta metode pengakuan pendapatannya akan sangat mempengaruhi akurasi laporan keuangan Institut Pertanian Bogor. Oleh karena itu, judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“Tinjauan Atas Metode Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya Terhadap Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2008 pada Institut Pertanian Bogor Menurut PSAK No. 45”**.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Perumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas Institut Pertanian Bogor tidak akan terbangun tanpa laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kaidah baku akuntansi yang berlaku. Mengingat keragaman arus masuk dan status pendapatan dari beragam sumber maka metode pengakuan pendapatan yang diterapkan akan sangat mempengaruhi akurasi penyusunan laporan keuangan tersebut. Hal ini karena metode pengakuan pendapatan yang tepat akan dapat memberikan informasi pendapatan yang akurat.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan tersebut maka penulis melakukan identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan pada Institut Pertanian Bogor?
- 2) Bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan menurut PSAK No. 45?
- 3) Bagaimana pengaruh metode pengakuan pendapatan terhadap kesesuaian penyajian laporan keuangan tahun 2008 pada Institut Pertanian Bogor menurut PSAK No. 45?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan metode pengakuan pendapatan dan pengaruhnya terhadap akurasi penyajian laporan keuangan, untuk disusun menjadi

makalah skripsi dengan melakukan perbandingan terhadap teori yang diperoleh dari studi pustaka.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan pada Institut Pertanian Bogor.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan menurut PSAK No.45.
3. Untuk mengetahui sejauh mana metode pengakuan pendapatan yang diterapkan mempengaruhi akurasi penyajian laporan keuangan pada Institut Pertanian Bogor menurut PSAK No. 45.

1.4. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu meliputi:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam bidang akuntansi keuangan, yaitu terutama mengenai perbandingan antara teori dan aplikasinya dalam penyusunan laporan keuangan pada Institut Pertanian Bogor.

b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai pengalaman Institut Pertanian

Bogor dalam menerapkan suatu metode pengakuan pendapatan dan pengaruhnya terhadap akurasi penyajian laporan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan khususnya bagi Institut Pertanian Bogor maupun PT-BHMN lainnya dalam pemilihan metode pengakuan pendapatan untuk memastikan bahwa laporan keuangannya akurat serta sesuai dengan kaidah dan teori akuntansi yang ada sehingga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas terhadap para pemangku kepentingan.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Salah satu faktor penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu organisasi nirlaba adalah kemampuan perusahaan untuk dapat menghasilkan kinerja dan memaksimalkan pendapatan. Pimpinan organisasi nirlaba harus dapat menjalankan strategi, langkah, dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

Pengakuan adalah proses untuk secara formal suatu organisasi bertindak mencatat transaksi. Pengakuan tidak sama dengan realisasi, walaupun keduanya kadang-kadang digunakan secara bergantian untuk menerangkan suatu hal dalam literatur dan praktik akuntansi. Pengakuan pendapatan tentu sangat terkait dengan penyajian laporan keuangan. Dalam penyajiannya di dalam

laporan keuangan, metode yang diterapkan dalam mengakui pendapatan tentunya mempengaruhi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Penggunaan metode pengakuan pendapatan yang tidak tepat akan mempengaruhi akurasi penyajian laporan keuangan yang dibuat. Karena dalam melihat suatu pendapatan tidak dilakukan dengan tepat maka akurasi informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan tidak akan akurat.

Mengingat laporan keuangan organisasi nirlaba juga menggunakan istilah pendapatan maka dalam kajian ini diuraikan berbagai pandangan mengenai pengakuan pendapatan pada perusahaan.

Pengakuan pendapatan menyangkut empat transaksi pendapatan pada organisasi nirlaba yang diakui sesuai dengan prinsip yang berlaku, yaitu:

1. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinprestasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan.
2. Pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih.
3. Pendapatan dari perizinan pihak lain untuk menggunakan aktiva organisasi, seperti bunga, sewa dan royalti diakui sesuai dengan berlakunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan.

4. Pendapatan dari pelepasan aktiva diakui pada tanggal transaksi dilakukan.

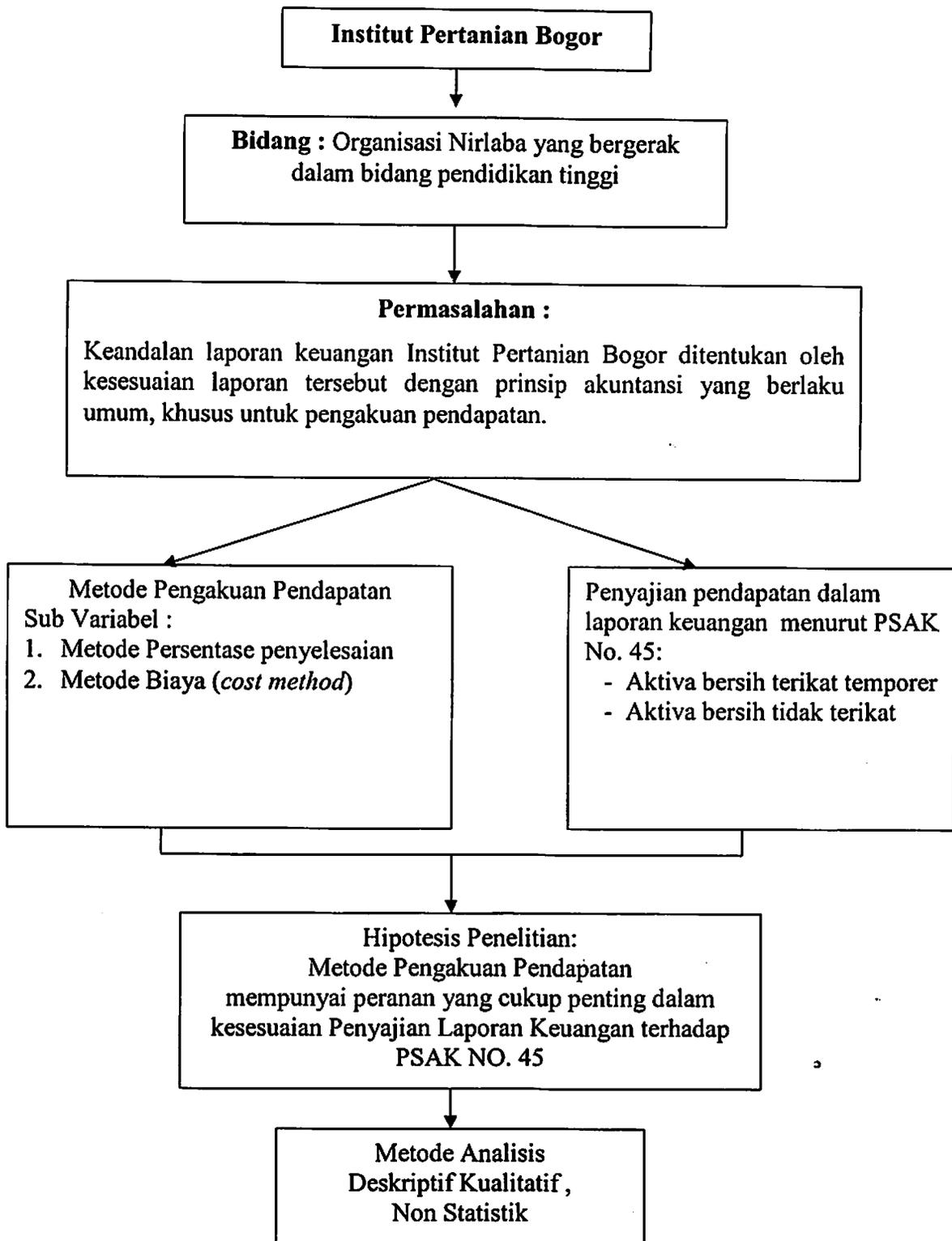
Sedangkan untuk pendapatan dan keuntungan yang diakui terdiri dari:

1. Pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan.
2. Pendapatan dan keuntungan tersebut diperoleh dari penyelesaian secara substantial atas aktivitas-aktivitas yang terkait dengan proses menghasilkan.

Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba pada umumnya ingin mengetahui dan mendapatkan informasi tentang posisi keuangan, aktivitas, dan arus kas dari organisasi tersebut. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui penyajian laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan organisasi tersebut sebagai suatu kesatuan sistem termasuk mencakup perusahaan yang dimilikinya walaupun merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain.

Salah satu ukuran keandalan laporan keuangan adalah kesesuaian penyajiannya terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, pendapatan sebagai bagian yang material dari laporan keuangan diakui sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

1.5.2. Paradigma Penelitian



1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atas jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian. Oleh karena itu, banyaknya hipotesis sesuai dengan banyaknya identifikasi dengan tujuan penelitian yang telah dibangun, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Dengan demikian, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap identifikasi masalah penelitian.

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Penerapan metode pengakuan pendapatan yang diterapkan pada Institut Pertanian Bogor sudah tepat.
2. Penerapan metode pengakuan pendapatan yang diterapkan telah sesuai menurut PSAK No. 45.
3. Penerapan metode pengakuan pendapatan yang tepat, dapat meningkatkan kesesuaian laporan keuangan IPB dengan PSAK No.45

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemahaman Tentang Metode Pengakuan pendapatan

Secara umum pedoman untuk pengakuan pendapatan cukup luas. Selain itu industri tertentu juga mempunyai pedoman yang sangat spesifik yang memberikan pandangan tambahan mengenai kapan pendapatan harus diakui. Prinsip pengakuan pendapatan (*Revenue Recognition Principle*) menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat:

1. Direalisasi atau dapat direalisasi.

Pendapatan direalisasi yaitu apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas piutang. Dan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim kas.

2. Sudah dihasilkan melalui penyelesaian yang substansial atas aktivitas yang terlibat dalam proses menghasilkan.

Penyelesaian secara substansial maksudnya apabila perusahaan yang menghasilkan pendapatan telah menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

2.1.1. Pengertian Metode Pengakuan Pendapatan

Pengakuan adalah proses untuk secara formal mencatat atau memasukkan suatu pos dalam akun dan laporan keuangan entitas. Pengakuan ini meliputi penjelasan suatu pos baik dengan kata-kata maupun

angka dan jumlah itu termasuk dalam angka total laporan keuangan. Pengakuan pendapatan menurut Kieso et al. (2005, 4) adalah sebagai berikut:

Pendapatan dihasilkan (*earned*) apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu yakni dalam proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

Pendapatan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang ataupun jasa yang telah diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan menurut Kieso et al. (2005, 4) adalah sebagai berikut:

Pendapatan arus masuk aktiva dan penyelesaian kewajiban akibat penyerahan barang atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama satu periode.

Dari definisi mengenai pengakuan pendapatan yang ada maka terdapat empat transaksi pendapatan pada organisasi nirlaba yang diakui sesuai dengan prinsip ini, yaitu:

1. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinprestasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan.
2. Pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih.
3. Pendapatan dari perizinan pihak lain untuk menggunakan aktiva organisasi, seperti bunga, sewa dan royalti diakui sesuai dengan berlakunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan.

4. Pendapatan dari pelepasan aktiva diakui pada tanggal transaksi dilakukan.

2.1.2. Fungsi Metoda Pengakuan Pendapatan

Fungsi metode pengakuan pendapatan. Menurut Kieso et al. (2005,5) ada 4 transaksi penjualan produk, sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan (penyerahan), meliputi :
 - a. Penjualan dengan perjanjian beli kembali, jika terdapat perjanjian beli kembali dengan harga tertentu dan harga saat ini dapat menutup semua biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang terkait itu tetap ada dalam pembukuan penjual.
 - b. Penjualan dengan hak retur, perusahaan tertentu mengalami tingkat retur yang tinggi rasio barang dagang yang dikembalikan terhadap penjualan yang tinggi sehingga mereka merasa perlu untuk menunda pelaporan penjualan sampai hak restue secara substantial sudah habis masa berlakunya.
 - c. *Trade Loading* dan *Channel Stuffing*, perusahaan mencatat pendapatan pada tanggal penyerahan tanpa membuat penyisihan untuk pembelian kembali ataupun retur yang tidak terbatas, walaupun perusahaan itu mengikuti pengakuan pendapatan pada saat penjualan yang berlaku, namun

sebenarnya mereka mengakui pendapatan dan laba sebelum waktunya.

2. Pengakuan Pendapatan Sebelum Penyerahan

- a. Metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*), yaitu mengakui pendapatan, biaya dan laba kotor sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang. Menunda pengakuan pos-pos ini sampai seluruh kontrak diselesaikan artinya salah menyajikan upaya (biaya) dan pencapaian (pendapatan) dalam periode akuntansi interim.
- b. Metode kontrak selesai (*completed contract method*), pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat penjualan yaitu pada saat kontrak diselesaikan. Biaya kontrak jangka panjang dalam proses dan penagihan tahun berjalan telah diakumulasi, tetapi tidak ada pembebanan atau perkreditan interim ke akun laporan laba rugi seperti pendapatan, biaya dan laba kotor.
- c. Kerugian kontrak jangka panjang, ada dua jenis kerugian kontrak jangka panjang yaitu;
 - kerugian periode berjalan atas kontrak yang menguntungkan, apabila selama konstruksi terdapat kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya

kontrak tetapi kenaikan tersebut tidak menghilangkan semua laba kontrak.

- Kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan, estimasi biaya akhir periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa kerugian akan terjadi ketika seluruh kontrak berakhir. Baik dalam metode persentase penyelesaian maupun metode kontrak selesai, keseluruhan perkiraan kerugian kontrak harus diakui dalam periode waktu berjalan.
- d. Pengungkapan dalam laporan keuangan, metoda pengakuan pendapatan yang harus digunakan untuk mengklasifikasikan untuk aktiva dan kewajiban sebagai lancar (sifat dan lamanya siklus operasi), dasar untuk pencapaian persediaan, pengaruh setiap revisi estimasi, jumlah pekerjaan dalam kontrak yang belum selesai, dan rincian mengenai piutang (yang sudah dan belum ditagih, saat jatuh tempo, suku bunga, ketentuan uang panjar, serta konsentrasi resiko kredit perorangan atau kelompok yang signifikan)
3. Pengakuan pendapatan setelah penyerahan
- a. Metode akuntansi penjualan cicilan (*Installment Sales Method*), lebih menekankan pada diterimanya hasil penagihan daripada penjualan. Metode ini mengakui laba dalam periode-periode

- diterimanya hasil penagihan dan bukan dalam periode penjualan.
- b. Metoda pemulihan biaya (*Cost Recovery Method*), tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual oleh penjual.
 - c. Metoda simpanan, tidak ada pendapatan atau laba yang harus diakui sampai penjualan selesai.
4. Pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus.
- a. Waralaba akuntansi untuk penjualan waralaba (*franchise*) dipilih karena popularitas, kerumitan dan kemampuan penerapannya pada banyak dasar pengakuan pendapatan yang telah dibahas sebelumnya. Untuk penjualan waralaba, akuntan harus menganalisis transaksi dan mempertimbangkan situasi, menggunakan pertimbangan dalam memilih serta menerapkan satu atau lebih dasar pengakuan pendapatan dan kemudian memantau situasi selama periode waktu yang panjang. Perjanjian waralaba dapat menetapkan pengembalian pembayaran kepada *franchisee*, jika kondisi-kondisi tertentu tidak terpenuhi, dan laba iuran waralaba dapat menurun secara drastis akibat biaya kewajiban dan jasa yang diberikan oleh *franchisor* di masa depan.

- b. Konsinyasi yaitu penyerahan barang dari pabrik (pedagang grosir) tidak dianggap sebagai pelaksanaan sepenuhnya sebagai penjualan karena pabrik masih memegang hak atas barang tersebut. Perjanjian ini, pabrik (*consignor*) menerima risiko bahwa barang dagang mungkin tidak terjual dan membebaskan dealer (*consignee*) (pabrik) dari keharusan mengkomitmenkan sebagian dari modal kerjanya dalam persediaan.

2.1.3. Jenis-jenis Metode Pengakuan Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 tahun 2009 paragraf 20 dan 21, metode pengakuan pendapatan terbagi menjadi 2. Yaitu:

Paragraf (20) Pengakuan pendapatan dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode.

Paragraf (21) Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Namun, bila suatu ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah yang pemulihannya (*recovery*) tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai suatu beban dari pada penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula.

2.2. Pemahaman tentang Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk memberikan jasa atau layanan dan tidak bertujuan untuk mencari laba (keuntungan) dari aktivitas operasionalnya. Sekolah merupakan salah satu bentuk dari organisasi nirlaba yang memberikan jasa atau layanan dalam bidang pendidikan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap pengelolaan sumber daya. Laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti anggota organisasi sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional. Di Indonesia, penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba sehingga laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami, relevan, andal, dan memiliki daya banding yang tinggi.

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Laporan keuangan merupakan ringkasan atas transaksi-transaksi ekonomi dalam suatu periode akuntansi yang diperlukan untuk mengetahui hasil usaha, bagaimana posisi keuangan dan berapa modal bertambah atau berkurang. Untuk itu penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian laporan keuangan.

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia

(2008, 8) dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu:

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan yang lengkap biasanya meliputi neraca, Laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Zaki Baridwan dalam buku *Intermediate Accounting* (2006, 2) adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”.

Selain itu pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 45 (Revisi 2009) adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan organisasi nirlaba yaitu meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode laporan, dan catatan atas laporan keuangan”.

Dan menurut akuntansi keuangan lanjutan Beams (2005, 298) yaitu:

“Mensyaratkan bahwa organisasi nirlaba untuk menyediakan seperangkat laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas”.

Berdasarkan pengertian laporan keuangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang

merupakan ringkasan dari transaksi keuangan selama periode akuntansi yang umumnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan dan catatan atas laporan keuangan.

Selanjutnya penulis akan menguraikan pengertian neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca adalah suatu daftar aktiva, kewajiban dan modal suatu perusahaan pada tanggal tertentu, yang biasanya pada tanggal terakhir bulan atau tahun. Laporan laba rugi adalah mengukur kinerja keuangan perusahaan yang menyediakan rincian pendapatan, beban, untung dan rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Dan untuk laporan arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas suatu perusahaan dalam periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Serta catatan atas laporan keuangan adalah hanya sebuah catatan total yang berkaitan atas laporan keuangan.

2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Walaupun rinciannya bervariasi diantara organisasi - organisasi, tujuan keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, pembiayaan, dan deviden, untuk suatu organisasi (pembiayaan deviden berarti memutuskan bagaimana perusahaan membayar imbalan kepada para investor atas penggunaan dana mereka. Namun menurut PSAK No. 45 Tahun 2009 paragraf 6 tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang,

anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

2.2.3. Keuntungan dan Keterbatasan Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Laporan keuangan adalah laporan yang elemen-elemennya dinyatakan dengan uang. Penilaian ini akan memberikan suatu anggapan bahwa fakta yang dinyatakan dengan angka dan satuan uang tersebut merupakan cerminan dari nilai perusahaan secara keseluruhan dengan pasti, benar dan tepat sesuai dengan ekonomi pada tanggal laporan tertentu. Menurut <http://peminatan.akuntansi.keuangan004.blog.spot.com//> Laporan keuangan yang elemen-elemennya dinyatakan dengan uang mempunyai banyak kelemahan, antara lain:

1. Laporan yang bersifat historis, yaitu penyajian data kejadian-kejadian yang telah lalu sehingga belum mencerminkan kondisi keuangan saat sekarang;
2. Laporan keuangan bersifat umum, sehingga calon pemakai tidak tahu secara rinci posisi keuangan perusahaan;
3. Penyusunan laporan keuangan masih mengandung bias dalam penaksiran-penaksiran dan pertimbangan-pertimbangannya;
4. Akuntansi hanya dapat memberi laporan kasar dan belum terperinci mengenai elemen-elemen pembandingan;
5. Laporan keuangan bersifat konservatif, yaitu tidak mengikuti dan mengantisipasi kebutuhan perusahaan;
6. Laporan keuangan tidak mempertimbangkan aspek-aspek lainnya di luar aspek ekonomi dalam memperhitungkan peristiwa yang sebenarnya terjadi;
7. Adanya penggunaan istilah-istilah teknis dalam laporan keuangan yang tidak komunikatif bagi masyarakat awam atau pemakai;

8. Adanya penggunaan berbagai macam metode akuntansi, akan menyebabkan terjadinya perbedaan baik dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis maupun dalam pengukuran tingkat keberhasilan perusahaan;
9. Adanya pengabaian informasi yang bersifat kualitatif, padahal aspek ini kemungkinan lebih diperlukan dari pada aspek ekonominya.

Keuntungan dan keterbatasan dalam penyajian laporan keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Materialitas, merupakan batas dimasa depan penerapan suatu prinsip yang harus diikuti dibawah batas tersebut pertimbangan atau kepatuhan terhadap prinsip atau konsep akuntansi tidak perlu diperhatikan, karena tidak berpengaruh kepada penyimpangan atau kepatuhan.
2. Biaya dan manfaat, untuk memperoleh informasi akuntansi yang bermanfaat diperlukan biaya, seperti halnya kegiatan-kegiatan lain, penerapan suatu prinsip atau konsep akuntansi juga harus mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat yang akan timbul.

2.2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Untuk kebutuhan para pemakai laporan keuangan, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan ada 4 faktor yang akan mempengaruhi dalam penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba yaitu:

1. Tepat waktu, informasi akuntansi hanya berguna bagi proses pengambilan keputusan bila disampaikan pada tepat waktunya (tidak terlambat)
2. Relevan, agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
3. Dapat dimengerti, informasi akuntansi harus dapat dimengerti oleh para pemakai dan dinyatakan dalam format dan terminologi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pemakai.
4. Dapat diuji informasi akuntansi harus dapat diuji kebenarannya oleh para penguji yang independent dan apabila menggunakan metode pengukuran yang sama maka hasilnya akan sama.
5. Netral, informasi akuntansi diperuntukkan bagi kebutuhan umum dan tidak dimaksudkan untuk memenuhi keinginan tertentu.
6. Keandalan yaitu jika batas pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat disajikan.
7. Dapat diperbandingkan yaitu pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

2.2.4.1. Penyajian Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, serta aset bersih dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Sehingga laporan posisi keuangan harus fokus pada organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban dan aktiva bersih. Menurut APB No.4 Statement dalam buku modul diktat oleh Ketut Sunarta (2009) adalah sebagai berikut:

Aktiva adalah sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim termasuk didalamnya beban ditanggungkan yang bukan merupakan sumber ekonomi.

Aktiva dibagi dalam dua macam (Ketut Sunarta, 2009) yaitu:

1. Aktiva lancar yaitu, kas dan aktiva-aktiva lain yang ditukarkan menjadi kas (uang) dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan. Contoh, surat berharga, kas, wesel tagih, perlengkapan, persediaan barang dagang.
2. Aktiva tetap aktiva bernilai besar yang sifatnya tetap atau permanent digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal. Contoh, tanah, gedung dan peralatan.

Aktiva tetap juga dibagi dalam aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud.

- a. Aktiva tetap berwujud (*tangible fixed cost*) aktiva yang dimiliki untuk dijual kembali dalam kegiatan normal termasuk dalam kategori persediaan walaupun aktiva tersebut, jika dipakai dapat berumur lebih dari satu tahun. Dengan contoh akumulasi penyusutan.
- b. Aktiva tetap tidak berwujud (*intangible assets*)
Aktiva perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Dengan contoh hak paten, hak cipta dan merk dagang.

Kewajiban menurut Soemarso (2005, 70) dalam akuntansi suatu pengantar adalah sebagai berikut:

Suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sesuai dengan konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu merupakan pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan perusahaan dimasa yang akan datang karena tindakan atas transaksi.

Kewajiban menurut Soemarso (2005, 70) dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek, kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun mendatang merupakan

arbitrer yang banyak dipilih dan dengan dengan periode akuntansi.

2. Kewajiban Jangka Panjang, kewajiban yang jatuh temponya lebih dari satu tahun diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

2.2.4.2. Penyajian Laporan Aktivitas

Penyajian laporan aktivitas hanya terfokus pada pendapatan dan beban. Menurut Beams (2005, 680) dalam akuntansi keuangan lanjutan adalah sebagai berikut:

Pendapatan (*revenue*) bertambahnya aktiva atau berkurangnya kewajiban atau kombinasi dari keduanya yang berasal dari pengiriman atau produksi atas barang, penyerahan jasa atau aktivitas utama perusahaan lainnya dan tidak termasuk aliran masuk yang bersumber dari bukan aktivitas utama perusahaan.

Pendapatan dilaporkan dalam pengelompokan dana yang berhubungan. Pendapatan yang tidak dibatasi penggunaannya oleh donatur meningkatkan aktiva bersih tidak terikat, pendapatan yang penggunaannya dibatasi oleh donatur meningkatkan baik aktiva bersih terikat temporer atau permanen.

Menurut Beams (2005, 681) dalam akuntansi keuangan lanjutan adalah sebagai berikut:

Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan

penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian penanaman modal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beban adalah seluruh barang dan jasa yang digunakan dalam satu periode untuk melakukan kegiatan dalam proses untuk mendapatkan pendapatan.

2.2.4.3. Penyajian Laporan Arus Kas

Menurut Soemarso (2005, 320) dalam akuntansi suatu pengantar bahwa penyajian laporan arus kas adalah:

Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan pokok, disamping neraca dan laporan laba rugi. Arus kas dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas sehingga memungkinkan para pemakai laporan keuangan mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai arus kas ke masa depan dari berbagai perusahaan.

Laporan arus kas harus melaporkan selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operai, investasi dan pendanaan. Klasifikasi menurut aktivitas tersebut akan memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan pengaruh terhadap posisi keuangan serta terhadap jumlah kas dan setara kas.

1. Aktivitas Operasi

Merupakan indikator apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman.

Memelihara kemampuan operasi memperbanyak deviden dan investasi baru tanpa mengandalkan sumber dana dari luar. Dengan contoh, aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (transaksi laba dan rugi)

2. Aktivitas investasi

Merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Dengan contoh, penerimaan kasa dari penjualan tanah, bangunan dan aktiva tetap tidak berwujud.

3. Aktivitas Pendanaan

Merupakan penerimaan dan pengeluaran kas untuk memprediksi klaim terhadap arus kas di masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Dengan contoh, pembayaran kas kepada pemegang saham.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pelaporan benar-benar efektif, maka seluruh informasi yang relevan harus disajikan dengan cara yang tidak bias, dapat dimengerti dan tepat waktu. Akan tetapi karena kendala biaya maka tidak harus semua informasi yang relevan harus disajikan. Disamping itu informasi yang terlalu banyak akan dapat membingungkan para pemakai laporan keuangan.

2.3. Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya terhadap Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba terhadap PSAK No.45

Dalam PSAK No.45, pendapatan disajikan di dalam laporan aktivitas. Dimana laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambahan aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.

Adapun informasi pendapatan menurut PSAK No.45 paragraf 27 dan 28 adalah :

Paragraf (27) Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian, pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasehat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan,

Paragraf (28) Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada diluar pengendalian organisasi dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan dan beban secara bruto di sajikan di dalam laporan aktivitas, termasuk jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada diluar pengendalian organisasi dan manajemen.

Adapun tujuan utama laporan aktivitas menurut PSAK No. 45 paragraf 19-20 adalah sebagai berikut:

Paragraf (19) Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai (a) pengaruh Transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, (b) hubungan agar transaksi, dan peristiwa lain, dan (c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, dan (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer

Paragraf (20) Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin dalam posisi keuangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh Transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan agar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode.

Didalam laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Pengertian dari macam-macam aktiva bersih tersebut menurut PSAK No. 45 paragraf 16-18 adalah sebagai berikut:

Paragraf (16) Pembatasan permanen terhadap (1) aktiva, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan dengan tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aktiva yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan

dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi abadi (*endowment*).

Paragraf (17) Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) Pemerolehan aktiva tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan. Pembahasan temporer untuk penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau penggunaan, atau keduanya.

Paragraf (18) Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen, atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, aktiva bersih terikat permanen mencakup aktiva yang disumbangkan dengan tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau aktiva yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

Aktiva bersih temporer mencakup sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau Pemerolehan aktiva tetap dari hasil pelepasan aktiva tetap.

Sedangkan untuk aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen, atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Tinjauan Atas Metode Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya terhadap Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pada Institut Pertanian Bogor (IPB).

Institut Pertanian Bogor memperoleh pendapatan dari berbagai beberapa sumber seperti dari DIPA (APBN) dan DM (Dana Masyarakat).

Status Institut Pertanian Bogor sebagai PT. BHMN sesuai dengan PP nomor 154 tahun 2000, yang mengakibatkan pencatatan pendapatan pada Institut Pertanian Bogor mempunyai kekhasan yang tidak dijumpai pada organisasi bisnis maupun organisasi sosial. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan Institut Pertanian Bogor merujuk pada PSAK No. 45.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh IPB meliputi Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Untuk memperoleh fakta atau prinsip dalam menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenarannya, maka dilakukan

pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi secara teliti, jelas dan sistematis yang meliputi :

1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif (eksploratif), dimana jenis penelitian ini digunakan menjelaskan fenomena/masalah yang terjadi pada Institut.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah Studi Kasus, yaitu metode penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang penulis gunakan adalah Analisis Kualitatif (Non Statistik), karena penelitian yang dilakukan tidak berhubungan dengan alat analisis statistik, karena lebih mengarah pada penyampaian wawasan yang datanya didapat berdasarkan sampel, maka penelitian kualitatif ini sulit untuk mendapatkan pembenaran serta

matematik. Namun data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif dapat menjadi data primer nantinya dapat ditindaklanjuti melalui penelitian kuantitatif.

2. Unit Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis berupa *Group*, yaitu sumber data yang unit analisisnya diperoleh dari respon grup atau unit fungsional dalam suatu organisasi, dalam hal ini pada Direktorat Keuangan Institut Pertanian Bogor.

<p>- Aktiva bersih tidak terikat</p>	<p>dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan. Pembahasan temporer untuk penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau penggunaan, atau keduanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan dari jasa 2. Penjualan barang 3. Sumbangan, dan dividen, atau 4. hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut 5. Batasan terhadap penggunaan aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi. 	<p>Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio</p>
--------------------------------------	---	--

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan sampel karena disesuaikan dengan jenis penelitian yang penulis lakukan, yaitu deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi kasus (*case study*). Walaupun tidak menggunakan sampel, penulis tetap memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk melengkapi, memenuhi dan menyusun skripsi ini melalui beberapa jenis prosedur pengumpulan data dan informasi dengan cara :

1. Riset Kepustakaan

Riset kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data dalam bentuk jadi atau data dalam bentuk teori dengan cara mempelajari, menelaah dan meneliti berbagai literatur seperti buku-buku dan catatan-catatan, makalah serta data-data lainnya yaitu Akuntansi Pengakuan Pendapatan yang dapat dijadikan referensi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

2. Riset Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara meneliti langsung kepada pihak yang berwenang dalam perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan teknik yang penulis gunakan, yaitu teknik wawancara, di mana penulis melakukan tanya jawab langsung kepada Direktorat keuangan Institut Pertanian Bogor, selaku pengelola keuangan Institut.

3.2.5. Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif (non statistik), yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia untuk kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian dilakukan tidak menggunakan statistik sebagai alat analisisnya, namun menggunakan kerangka teori dan kriteria sebagai alat analisis. Adapun data yang penulis

teliti adalah Akuntansi Pengakuan Pendapatan Institut Pertanian
Bogor tahun 2008

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV menyatakan tentang Profil Institut Pertanian Bogor, Kebijakan akuntansi IPB, kebijakan akuntansi menurut PSAK, dan Tinjauan atas metoda pengakuan pendapatan dan pengaruhnya terhadap kesesuaian penyajian laporan keuangan tahun 2008 menurut PSAK No. 45.

4.1. Profil Institut Pertanian Bogor

4.1.1. Sejarah Singkat Institut

Sejarah perkembangan IPB dimulai dari tahapan embrional (1941-1963), tahap kelahiran dan pertumbuhan (1963-1975), tahap pendewasaan (1975-2000), tahap implementasi otonomi IPB (2000-2005) dan menuju tahap IPB berbasis Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang akan dimulai pada tahun 2006. Pada tahun 2007 secara embrional IPB diharapkan siap menjadi universitas riset.

Pada tahun 2000, pemerintah menerbitkan PP No. 154 yang membuat IPB menjadi salah satu PTN yang memiliki status sebagai PT. BHMN. Kepemilikan badan hukum perguruan tinggi tersebut masih berada di tangan negara namun badan hukum tersebut mempunyai derajat kemandirian yang besar. Tahap ini disebut tahap otonomi.

Selama tahap otonomi tersebut, IPB telah mengalami 2 kali pergantian kepemimpinan, Prof.Dr.Ir.Ahmad Ansori Mattjik,M.Sc

merupakan Rektor IPB yang pertama dipilih dalam mekanisme IPB sebagai BHMN Rektor dipilih oleh MWA untuk masa bakti 2003-2007 dengan program kerja utama untuk mewujudkan academic excellent dan generating income excellent, sehingga diharapkan mampu menghantarkan IPB sebagai universitas riset yang secara embrional terwujud pada tahun 2007.

Dr. Ir. H. Herry Suhardiyanto, M.Sc. merupakan Rektor IPB yang dipilih melalui Pemilihan Raya IPB BHMN sebagai Rektor yang dipilih oleh MWA untuk masa bakti 2008-2013 dengan program kerja utama untuk Menyelaraskan Mosaik Transformasi IPB menuju Research based Entrepreneurial University Kelas Dunia dengan Kepemimpinan yang Melayani dan Terpercaya.

Visi IPB adalah Menjadi universitas riset terkemuka di Asia dengan kompetensi utama pertanian tropika, berkarakter kewirausahaan, dan bersendikan keharmonisan. Sedangkan misinya adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu tinggi dan pembinaan kemahasiswaan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan pada masa yang akan datang.
3. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berkarakter kewirausahaan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

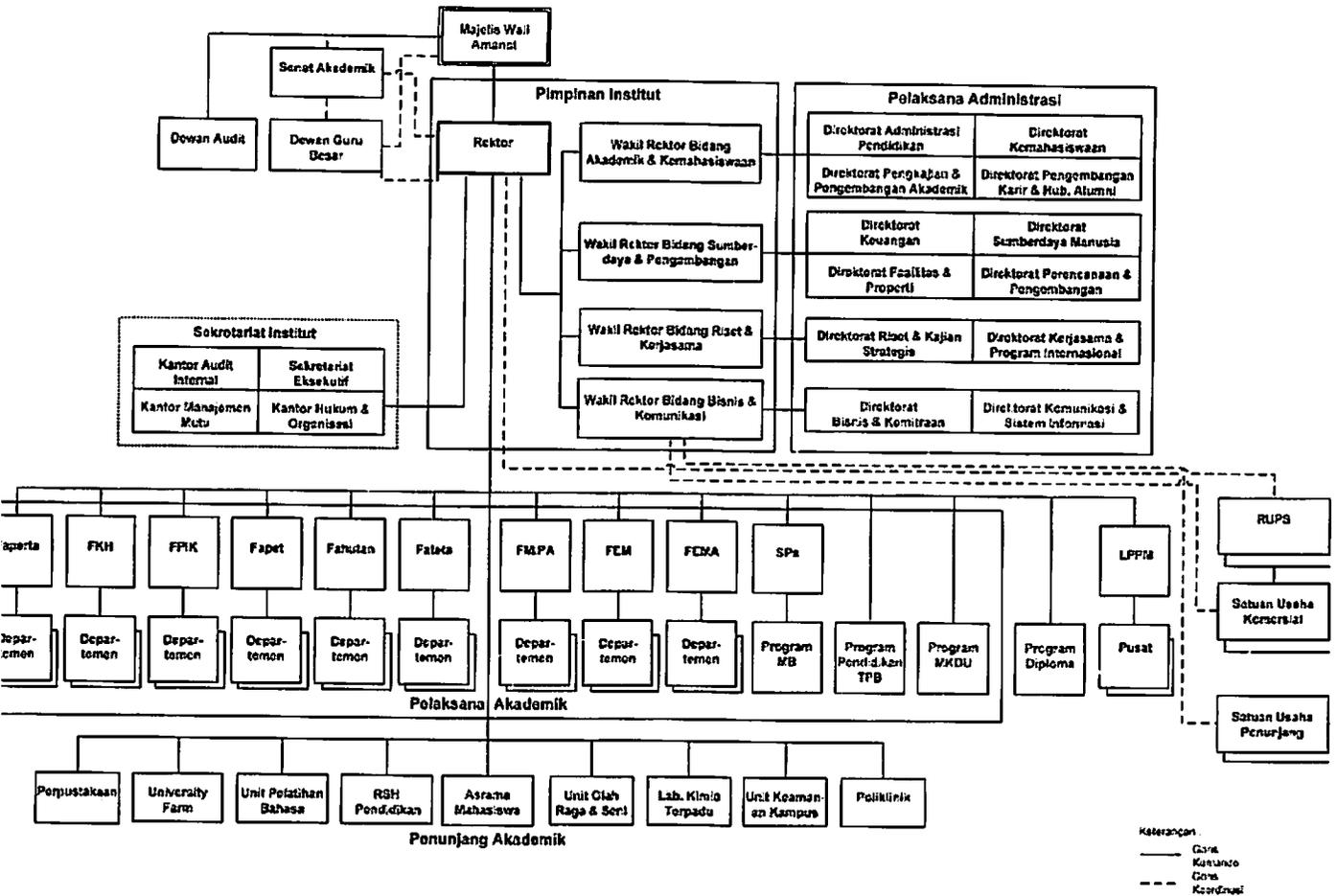
4. Mendorong terbentuknya masyarakat madani berdasarkan kebenaran dan hak asasi manusia.

Setelah mendapat status sebagai BHMN, IPB memulai proses transformasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Untuk meningkatkan prinsip-prinsip tersebut, IPB perlu memperhatikan metode pengakuan pendapatan yang dimiliki IPB sesuai dengan PSAK No. 45 mengenai pelaporan organisasi nirlaba.

4.1.2. Struktur Organisasi

Salah satu faktor keberhasilan Institut adalah kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan, oleh karena itu diperlukan suatu koordinasi yang baik dari seluruh kegiatan yang dilakukan masing-masing individu yang ada dalam Institut. Untuk itu Institut yang baik perlu adanya struktur organisasi yang baik pula. Pemimpin tertinggi di IPB adalah Rektor, yang bertanggung jawab secara langsung kepada Majelis Wali Amanat. Adapun struktur organisasi yang ada di dalam IPB adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI IPB



Sumber: Institut Pertanian Bogor

Gambar 1: Struktur Organisasi IPB

4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Institut

IPB adalah salah satu PTN diantara empat PTN lainnya yang telah mendapatkan status sebagai PT. BHMN sesuai dengan PP Nomor 154 Tahun 2000. Sebagai PT. BHMN, IPB pengakuan pendapatan yang ada di IPB harus sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku umum atau merujuk kepada PSAK No. 45.

Pendapatan IPB terbagi dalam 2 sumber, pertama DIPA atau APBN. Untuk pengajuan DIPA, IPB harus membuat TOR (Term Of

Reference) yang berisi rencana kegiatan masing-masing unit yang ada di IPB termasuk RAB (Rencana Anggaran Belanja). Sedangkan yang kedua adalah DM (Dana Masyarakat). DM ini berasal dari Masyarakat, usaha dan tabungan IPB. Semua sumber dana tersebut, harus masuk kedalam rekening Rektor. Untuk pengeluaran dana tersebut harus melalui mekanisme RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang dibuat tiap tahun dan direvisi persemester.

Dalam RKAT, semua rencana penerimaan dan pengeluaran harus di catat. Termasuk penerimaan pelaksana administrasi (Kantor dan Direktorat) dan pelaksana akademik (Fakultas dan Departemen)

4.2. Kebijakan Akuntansi IPB

Mengingat status kelembagaan IPB telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri BHMN, yang kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka penyelenggaraan akuntansi IPB secara umum mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Sesuai standar akuntansi yang dipilih, pada akuntansi IPB diterapkan pula prinsip-prinsip umum dan konsep-konsep dasar yang digunakan pada Standar Akuntansi Keuangan dan dituangkan kedalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 006/I3/KU/2007 tentang Pedoman Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor. Khusus untuk metode pengakuan pendapatan di IPB sendiri digunakan metode *cost*

method (metode biaya) yang merupakan salah satu metode yang diakui oleh Ikatan Akuntan Indonesia menurut PSAK 23.

Pendapatan yang diterima oleh IPB digolongkan menjadi 2 golongan yaitu:

1. Pendapatan yang berasal dari subsidi pemerintah yang berupa APBN (DIPA) atau dari Dikti
2. Pendapatan yang berasal dari DM (Dana Masyarakat)

4.2.1. Pengakuan Pendapatan yang Berasal Dari Pemerintah

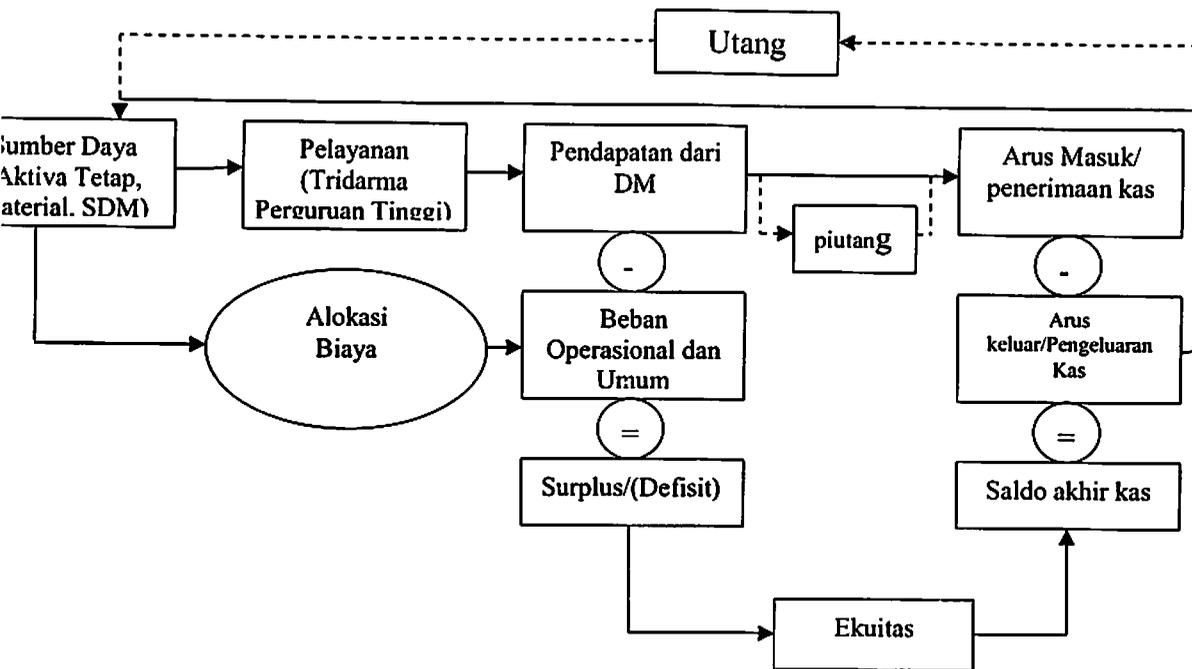
Setiap transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran dari APBN akan di akui sesuai dengan sistem akuntansi dari Departemen Keuangan RI. Sehingga tidak mengikuti sistem akuntansi yang berlaku umum.

Pendapatan dari pemerintah yang diterima oleh IPB tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Melalui DIPA IPB BHMN	Rp.126.236.831.736
2. Melalui Dikti	<u>Rp. 16.312.977.566</u>
Total	RP.142.549.809.302

4.2.2. Pengakuan Pendapatan yang Berasal Dari Dana Masyarakat

Dalam garis besar, kegiatan IPB terutama yang berasal dari DM dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Institut Pertanian Bogor

Gambar 2: Garis Besar Kegiatan IPB Yang Berasal Dari DM

Maksud dalam gambar diatas adalah dengan sumber daya yang dimiliki, berupa aktiva tetap, material, dan SDM, IPB melakukan pelayanan, berupa penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Dari kegiatan pelayanan itulah IPB memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut:

1. Ada yang diterima langsung pada saat jatuh tempo, sehingga menghasilkan penerimaan/ arus masuk kas.
2. Ada pula yang tidak segera diterima pada saat jatuh tempo, sehingga diakui sebagai piutang terlebih dahulu, kemudian dilakukan upaya penagihan, hasil dari penagihan itulah yang nanti akan menjadi penerimaan.
3. Disamping dari hasil pelayanan, IPB juga memperoleh pendapatan/penerimaan kas dari hibah, dan satuan usaha.

Penerimaan-penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai sumber daya, baik berupa pemeliharaan dan pembelian aktiva tetap dan material, atau SDM.

Metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan tersebut adalah dengan menggunakan metode biaya, dimana dalam metode biaya (*Cost Method*) pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh Institut. Namun, bila suatu ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah yang pemulihannya (*recovery*) tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai suatu beban daripada penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula. Contoh yang terjadi dalam IPB adalah pendapatan dari penerimaan SPP.

Dalam penerimaan SPP, jika pendapatan tersebut tidak dapat tertagih. Maka IPB akan mengakuinya sebagai piutang tak tertagih. Dan akan menganggapnya sebagai beban Institut. Pendapatan yang diterima IPB tahun 2008 yang masuk melalui DM adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan SPP	Rp.136.570.110.545
2. Pendapatan Non SPP	Rp. 8.047.098.422
3. Pendapatan kerjasama	Rp. 67.837.809.612
4. Pendapatan Usaha Komersil	Rp. 6.052.082.343
5. Pendapatan dari usaha penunjang	Rp. 7.788.685.590

Dengan total keseluruhan penerimaan DM tahun 2008 sebesar
Rp. 226.295.786.512,-

4.2.2.1. Pencatatan Pengakuan Pendapatan dari DM

Penerimaan dari Dana Masyarakat (DM) terbagi atas penerimaan kas di bendahara dan kas di bank (penerimaan dari SPP, penerimaan dari uang non SPP, penerimaan uang dari hasil kontrak kerja, Penerimaan uang dari Hibah, penerimaan uang dari usaha jasa.), pelepasan aktiva tetap, penerimaan piutang, dan penerimaan pihak ketiga jangka panjang.

Dibawah ini adalah jurnal-jurnal dari pendapatan-pendapatan tersebut.

1. Penerimaan Kas di bendahara dan kas di bank

Penerimaan uang dari SPP

Kas dan Setara Kas	xxx	
Penerimaan SPP		xxx

Penerimaan dari uang non SPP

Kas dan Setara Kas	xxx	
Penerimaan Non SPP		xxx

Penerimaan dari uang hasil kontrak

Kas dan Setara Kas	xxx	
Penerimaan hasil kontrak kerja		xxx

Penerimaan dari uang hibah

Kas dan Setara Kas	xxx	
Penerimaan hibah		xxx

Penerimaan dari uang usaha jasa

Kas dan Setara Kas	xxx	
Penerimaan jasa		xxx

2. Pelepasan aktiva tetap

Kas di bendahara/bank	xxx	
Akumulasi penyusutan Aktiva tetap	xxx	
Tanah/bangunan/inventaris		xxx
Laba pelepasan aktiva tetap		xxx

3. Piutang Pihak ketiga

Kas di bank	xxx	
Piutang xxx		xxx

4. Piutang Pihak ketiga jangka panjang

Kas di bank	xxx
Pinjaman/Piutang xxx	xxx

Semua Jurnal-jurnal tersebut termasuk jurnal-jurnal lainnya, akan masuk ke dalam buku besar (*General Ledger*) lalu akan menjadi masuk kedalam laporan keuangan IPB.

Laporan Keuangan IPB mengacu pada PSAK No. 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis pada umumnya. Pendapatan-pendapatan IPB dicatat di dalam Laporan Posisi keuangan sebagai Aktiva bersih terikat temporer dan Aktiva bersih tidak terikat

Pendapatan yang masuk di dalam Aktiva bersih terikat temporer adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan jasa lembaga keuangan
2. Pendapatan Kerjasama Operasi (KSO)
3. Pendapatan Investasi
4. Pendapatan Sewa
5. Keuntungan Penjualan Sumbangan Terikat Temporer
6. Bantuan Pemerintah
7. Sumbangan Pihak Lain diluar pemerintah dari dalam negeri
8. Sumbangan Pihak Lain diluar pemerintah dari luar negeri

Sedangkan pendapatan yang masuk di dalam Aktiva bersih terikat temporer adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Operasional
2. Sumbangan tanpa syarat
3. Pendapatan sumbangan penerimaan pendidikan (SPP) dan non SPP
4. Pendapatan jasa penelitian
5. Pendapatan Jasa Pengabdian pada Masyarakat
6. Pendapatan Jasa Lembaga keuangan
7. Pendapatan kerjasama operasional
8. Pendapatan sewa
9. Pendapatan penjualan aktiva tetap
10. Pendapatan komersil

Contoh dari pencatatan laporan posisi keuangan untuk organisasi nirlaba adalah sebagai berikut:

FILE Lk ipb 2008

Catatan Atas Laporan Keuangan

1.20. Aktiva Bersih Rp. 730.700.937.862

Jumlah tersebut merupakan saldo aktiva bersih per 31 Desember 2007, dengan rincian sebagai berikut:

1. Aktiva bersih tidak terikat

Aktiva bersih tidak terikat meliputi pendapatan yang tidak terikat penggunaannya yang merupakan kenaikan aktiva bersih tidak terikat per 31 Desember 2008 sejumlah Rp. 38.164.083.177

2. Aktiva bersih terikat temporer sejumlah Rp. 2.747.528.916

3. Aktiva bersih terikat permanen

1) Dana Abadi	1.700.000.000
2) Hasil Investasi Aktiva Tetap	<u>688.089.325.769</u>
Jumlah	689.789.325.769

4.3. Kebijakan Akuntansi Menurut PSAK

4.3.1. Metode Pendapatan Menurut PSAK No. 23

Dalam PSAK No. 23 mengenai Pendapatan, terdapat dua metode pengakuan pendapatan yaitu metode persentase penyelesaian dan metode biaya (*cost method*). Adapun pengertian terhadap kedua metode tersebut terdapat di dalam Bab 2. Skripsi ini. Namun untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 2005

Pendapatan	$75 \% \times \text{Rp. } 3.000.000$	=	Rp 2.250.000
Pendapatan diakui tahun 2004			(<u>1.200.000</u>)
			1.050.000
Biaya			(<u>910.000</u>)
	Laba		Rp 140.000

- 2006

Pendapatan	$75 \% \times \text{Rp. } 3.000.000$	=	Rp 3.000.000
Pendapatan diakui tahun 2004 dan 2005			(<u>2.250.000</u>)
			750.000
Biaya			(<u>650.000</u>)
	Laba		Rp 100.000

2. Metode Biaya (*cost method*)

Dengan metode ini Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh Institut. Namun, bila suatu ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah yang pemulihannya tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai suatu beban daripada penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula.

Metode inilah yang saat ini digunakan IPB untuk mengakui pendapatan yang mereka terima terutama pendapatan yang berasal dari Dana Masyarakat (DM).

Dengan metode ini, mengakibatkan terdapat piutang untuk tahun 2008 terutama dari piutang SPP yang kemungkinan tidak dapat tertagih dan dapat menjadi beban bagi IPB sebesar Rp. 4.198.516.250.

4.3.2. Pelaporan Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 45

Dalam PSAK No. 45 mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan tersebut terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan,
2. Laporan aktivitas,
3. Laporan arus kas, dan
4. Catatan atas laporan keuangan

Pendapatan-pendapatan dalam PSAK No. 45 ini dicatat di dalam Laporan Posisi keuangan sebagai Aktiva bersih terikat temporer dan Aktiva bersih tidak terikat.

Adapun pendapatan-pendapatan yang tercatat tersebut adalah sebagai berikut:

Aktiva bersih terikat temporer:

1. Sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu,
2. Investasi untuk jangka waktu tertentu,
3. Penggunaan selama periode tertentu dimasa depan,
4. Pemerolehan aktiva tetap.

Aktiva bersih tidak terikat:

1. Pendapatan dari jasa,
2. Penjualan barang,

3. Sumbangan, dan
4. Dividen atau hasil investasi

Untuk metode pengakuan pendapatan yang digunakan itu mengikuti karakteristik dari Institut tersebut atau mengikuti jenis operasional Institut. Untuk metode persentase penyelesaian hanya di gunakan oleh Institut yang bergerak dibidang jasa konstruksi, sementara itu untuk Institut nirlaba metode pengakuan pendapatannya menggunakan metode biaya (*cost method*).

Contoh dari pencatatan laporan posisi keuangan untuk oraganisasi nirlaba adalah sebagai berikut:

Organisasi Nirlaba
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 19X0 dan 19X1
(dalam jutaan)

Aktiva:	<u>19X1</u>	<u>19X0</u>
Kas dan setara kas	Rp. 188	Rp. 1.150
Piutang bunga	5.325	4.175
Persediaan dan biaya dibayar di muka	1.525	2.500
Piutang lain-lain	7.562	6.750
Investasi Lancar	3.500	2.500
Aktiva terikat untuk investasi dalam tanah, bangunan, dan peralatan	13.025	11.400
Tanah, bangunan dan peralatan	154.250	158.975
Investasi jangka panjang	<u>545.175</u>	<u>508.750</u>
Jumlah Aktiva	Rp. 730.550	Rp.696.200

Kewajiban dan Aktiva Bersih:

Hutang dagang	Rp. 6.425	Rp. 2.625
Pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan		1.625
Hutang Lain-Lain	2.187	3.250
Hutang wesel		2.850
Kewajiban tahunan	4.213	4.250
Hutang jangka panjang	13.750	16.250
Jumlah Kewajiban	Rp. 26.575	Rp. 30.850

Aktiva Bersih:

Tidak Terikat	Rp. 288.070	Rp. 259.175
Terikat temporer (Catatan B)	60.855	63.675
Terikat permanen (Catatan C)	355.055	342.500
Jumlah Aktiva Bersih	703.975	665.350
Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih	Rp. 730.550	Rp.696.200

Untuk memahami aktivitas yang masuk kedalam aktiva bersih terikat temporer dan aktiva bersih terikat permanen maka perlu disajikan catatan atas laporan keuangan, seperti yang ada di bawah ini:

Catatan B

Aktiva bersih terikat temporer untuk periode periode keuangan adalah sebagai berikut:

Aktivitas program A:	
Pembelian peralatan	Rp 7.650
Penelitian	10.640
Seminar dan publikasi	3.800
Aktivitas program B:	
Perbaikan kerusakan peralatan	5.600
Seminar dan publikasi	5.395
Aktivitas program C:	
Umum	7.420
Bangunan dan peralatan	5.375
Perjanjian perwalian tahunan	7.125
Untuk periode setelah 31 Desember, 19X1	7.850
	<u>Rp 60.855</u>

Catatan C

Aktiva bersih terikat permanen dibatasi untuk:
Investasi tahunan, penghasilannya dibelanjakan untuk mendukung:

Aktivitas program A	Rp 68.810
Aktivitas program B	34.155
Aktivitas program C	34.155
Kegiatan lain organisasi	204.930
	<u>Rp 342.050</u>
Dana yang penghasilannya untuk ditambahkan pada jumlah sumbangan	
mula-mula hingga mencapai nilai Rp 2,500	5.300
Polis asuransi kematian yang penerimaan ganti rugi asuransi atas kematian pihak	200
Tanah yang harus digunakan untuk area rekreasi	7.500
	<u>Rp 355.050</u>

4.4. Tinjauan Atas Metoda Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya Terhadap Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2008 Menurut PSAK No.45.

4.4.1. Tinjauan Metode Pengakuan Pendapatan Institut Pertanian Bogor.

Metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan IPB adalah dengan menggunakan metode biaya, dimana dalam metode biaya (*Cost Method*) pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi schubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh Institut. Namun, bila suatu ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah yang pemulihannya (*recovery*) tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai suatu beban daripada penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula. Hal ini dikarenakan karakteristik IPB yang bukan merupakan Institut konstruksi, sehingga metode persentase penyelesaian tidak sesuai dengan karakteristik IPB tersebut.

Metode tersebut telah termuat didalam PSAK No.23 sehingga metode yang diterapkan di IPB telah sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku umum, terutama menurut PSAK No.23.

4.4.2. Kesesuaian Laporan Kuangan IPB dengan PSAK No. 45

Pencatatan pendapatan IPB di dalam Laporan Posisi keuangan sebagai Aktiva bersih terikat temporer dan Aktiva bersih tidak terikat.

Pendapatan IPB yang masuk di dalam Aktiva bersih terikat temporer adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan jasa lembaga keuangan
2. Pendapatan Kerjasama Operasi (KSO)
3. Pendapatan Investasi
4. Pendapatan Sewa
5. Keuntungan Penjualan Sumbangan Terikat Temporer
6. Bantuan Pemerintah
7. Sumbangan Pihak Lain diluar pemerintah dari dalam negeri
8. Sumbangan Pihak Lain diluar pemerintah dari luar negeri

Dan pendapatan IPB yang masuk di dalam Aktiva bersih tidak terikat temporer adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Operasional
2. Sumbangan tanpa syarat
3. Pendapatan sumbangan penerimaan pendidikan (SPP) dan non SPP
4. Pendapatan jasa penelitian
5. Pendapatan Jasa Pengabdian pada Masyarakat
6. Pendapatan Jasa Lembaga keuangan
7. Pendapatan kerjasama operasional
8. Pendapatan sewa
9. Pendapatan penjualan aktiva tetap
10. Pendapatan Komersil

Pencatatan pendapatan PSAK No. 45 juga berada di dalam Laporan Posisi keuangan sebagai Aktiva bersih terikat temporer dan

Aktiva bersih tidak terikat. Adapun pendapatan-pendapatan yang tercatat tersebut adalah sebagai berikut:

Aktiva bersih terikat temporer:

1. Sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu,
2. Investasi untuk jangka waktu tertentu,
3. Penggunaan selama periode tertentu dimasa depan,
4. Pemerolehan aktiva tetap.

Aktiva bersih tidak terikat:

1. Pendapatan dari jasa,
2. Penjualan barang,
3. Sumbangan, dan
4. Dividen atau hasil investasi

Berdasarkan kedua jenis tersebut, maka terdapat perbedaan antara pengakuan pendapatan yang masuk kedalam aktiva bersih. Perbedaan yang mencolok terdapat pendapatan komersil sebesar Rp. 6.062.082.343,-. Hal ini terjadi karena status IPB sebagai PT. BHMN sehingga IPB diperbolehkan untuk melakukan kegiatan komersil, yaitu KSO dengan PT. Indah Pesona Bogor (Ekalokasari Plaza) sebesar Rp. 3.359.886.069,- dan dengan PT. Bogor Life Science and Technology (PT. BLST) sebesar Rp. 2.692.196.274,-.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. IPB merupakan salah satu PTN yang telah memiliki status sebagai PT. BHMN sesuai dengan PP No. 154 tahun 2000. Setelah mendapat status sebagai BHMN, IPB memulai proses transformasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Untuk meningkatkan prinsip-prinsip tersebut, IPB perlu memperhatikan metode pengakuan pendapatan yang dimiliki IPB sesuai dengan PSAK No. 45 mengenai pelaporan organisasi nirlaba. Sesuai pedoman akuntansi yang berlaku umum, pada akuntansi IPB diterapkan pula prinsip-prinsip umum dan konsep-konsep dasar yang digunakan pada Standar Akuntansi Keuangan dan dituangkan kedalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 006/I3/KU/2007 tentang Pedoman Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor. Pendapatan yang diterima IPB berasal dari 2 sumber yaitu APBN dan DM (dana masyarakat), Setiap transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran dari APBN akan di akui sesuai dengan sistem akuntansi dari Departemen Keuangan RI. Sehingga tidak mengikuti sistem akuntansi yang berlaku umum. Namun berbeda dengan sumber dana

yang berasal dari DM, pencatatannya harus menggunakan metode yang diakui oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

2. Metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan IPB adalah dengan menggunakan metode biaya, dimana dalam metode biaya (*Cost Method*) pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Namun, bila suatu ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah yang pemulihannya (*recovery*) tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai suatu beban daripada penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula. Hal ini dikarenakan karakteristik IPB yang bukan merupakan perusahaan konstruksi, sehingga metode persentase penyelesaian tidak sesuai dengan karakteristik IPB tersebut. Metode tersebut telah termuat didalam PSAK No.23 sehingga metode yang diterapkan di IPB telah sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku umum, terutama menurut PSAK No.23. Laporan Keuangan IPB mengacu pada PSAK No. 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis pada umumnya. Pendapatan-pendapatan IPB dicatat di dalam Laporan Posisi keuangan sebagai Aktiva bersih terikat temporer dan Aktiva bersih tidak terikat.

3. Berdasarkan analisis pada BAB IV, terdapat perbedaan antara pendapatan yang masuk ke dalam Aktiva bersih baik itu terikat temporer dengan tidak terikat, yaitu pendapatan dari KSO dan pendapatan komersil yang tercatat di dalam laporan keuangan.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan dan pembahasan diatas, penulis memberi saran perbaikan bahwa IPB perlu melakukan perbaikan atas pencatatan pendapatan komersil yang berasal dari KSO antara IPB dengan PT. Indah Pesona Bogor (Ekalokasari Plaza) sebesar Rp. 3.359.886.069,- dan dengan PT. Bogor Life Science and Technology (PT. BLST) sebesar Rp. 2.692.196.274,-.

Sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku umum (PSAK No. 45), pendapatan komersil tersebut sebaiknya dicatat sebagai pendapatan deviden sebesar Rp. 6.062.082.343,- pada tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik-Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ke 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Brigham dan Houston. 2006. *Fundamental Of Financial Management*. Edisi 10. Alih Bahasa : Ali Akbar Yulianto. Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Dunia, Firdaus A. 2005. *Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi*, Edisi 2 FEUI, Jakarta.
- Horngen T Charles, Walter T Harrison Jr, Lindar Smith Bamber. *Accounting*. 6th Edition. 2006. Alih Bahasa: Barlian Muhammad. Akuntansi. PT Indeks kelompok Gramedia, Jakarta.
- Institut Pertanian Bogor. 2007. *Pedoman Akuntansi Institut Pertanian Bogor*
- Keown, Arthur J., John D Martin, J. Willian Petty, dan David F Scott, Jr. 2004. *Manajemen Keuangan: Prinsip-prinsip dan Aplikasi*. Edisi ke 9. Alih Bahasa: Zuliani Dalimunthe. Jilid 1, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Wey Gandt, terry D. Warfield. 2005. *Accounting Intermediate*. Edisi Bahasa Indonesia, Edisi Ke 10. Alih Bahasa: Herman Wibowo, Ancelle A. Hemawan, SE. Akt.MBA. Jilid 3, Erlangga, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulya, Hadri. 2007. *Memahami Akuntansi Dasar ; Pendekatan Teknik Siklus Akuntansi*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Munandar, Drs. 2005. *Pokok-pokok Intermediate Accounting*. Edisi ke 4, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Santoso, Iman. 2007. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*. Buku 1, PT Refika Aditama Bandung.
- Skousen, Fred K. 2006. *Intermediate Accounting*, Volume Komprehensif. Alih Bahasa Dr., Ak. Hygiunus Riswanto dan Herman, Salemba Empat, Jakarta.

- Soemarso, S.R. 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Ke 5. Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan. 2008. Ikatan Akuntansi Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan. 2009. Ikatan Akuntansi Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
- Stice, Earl. K, James D. Stice, K. Fred Skousen. 2007. *Intermediate Accounting*. Edisi Bahasa Indonesia, Edisi Ke 15. Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Suigiarso, G. dan F. Winarni. 2006. *Manajemn Keuangan*. Media Presindo, Yogyakarta.
- Thomson. 2006. *Teori Akuntansi*, Edisi Bahasa Indonesia Edisi Ke 5. Alih Bahasa: Ahmed Riahi, Belkaoui. Salemba Empat, Jakarta.
- Warren, Fess reeve. *Accounting*. 2006. Alih Bahasa: Aria Farahmita, Amanugraharini, Taufik Hendrawan. Pengantar Akuntansi. Adisi Ke 21, Salemba Empat, Jakarta.
- Wild, Jhon J. K.R. Subramanyan, dan Robert F Halsey. *Financial Statement Analyst*. 8th Edition . 2005. Alih Bahasa : Harahap Nurwahyu dan Yunivi S Bachtiar. *Analisis Laporan Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Yusuf, Amir Abadi dan Floyd A. Beams. 2005. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Edisi revisi. Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.